

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2012-2016**

**Muhamad Sudrajad
STIE Swasta Mandiri Surakarta**

**Amru Sukmajati
STIE Swasta Mandiri Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2012-2016. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder. Dilaksanakan selama 5 tahun, yaitu sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2016. Populasi penelitian ini adalah 13 Bank Umum Syariah di Indonesia, maka teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data berupa laporan keuangan tahunan. Untuk uji validitas data penelitian ini diverifikasi dengan dipublikasikannya data tersebut dalam website masing-masing Bank Umum Syariah dan website Bank Indonesia. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2012-2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah terhadap Return On Asset, dimana nilai F hitung sebesar 0,741 dengan nilai probabilitas sebesar $0,572 > 0,05$. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel ukuran dewan komisaris (X1) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,254 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel ukuran dewan direksi (X2) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,720 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel ukuran komite audit (X3) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,953 Lebih besar dari 0,05. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel ukuran dewan pengawas syariah (X4) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,395 lebih besar dari 0,05.

Kata Kunci: Return On Asset, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah

LATAR BELAKANG

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga di akibatkan oleh belum di implementasikannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Banyak penyebab utama kegagalan bank yaitu salah satunya dengan adanya manajemen bank yang buruk, karena berani mengambil risiko, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap tindak penipuan dan penggelapan dana. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi, hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang apabila disertai tiga tindakan penting, yakni: (1) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, (2) Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, (3) Pengawasan yang efektif dari otorisasi pengawasan bank (Wahyudi, Zarkasyi, 2008).

Konsep *corporate governance* muncul berdasarkan *Agency theory* yang ini memandang bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik sebagai principal dimana pihak manajemen (agen) lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perusahaan dibanding pihak pemilik (prinsipal). Pihak manajemen harus mengungkapkan

informasi perusahaan kepada pihak pemilik (prinsipal) namun terkadang informasi yang disampaikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari perusahaan sehingga hal ini akan menimbulkan permasalahan konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya agensi (*agency cost*). Sehingga dengan adanya *good corporate governance* permasalahan agensi antara pemilik dan manajer akan teratasi (Hart dalam Sayidah, 2007).

Tingkat kesehatan dan kinerja keuangan perbankan sendiri biasanya diukur dengan seberapa besar tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang nota bene adalah profit motif dapat digunakan analisis profitabilitas (Wisnu, 2005). Profitabilitas dapat diukur dengan rasio *Return on Asset* (ROA). ROA adalah rasio antara keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah aset secara keseluruhan, atau seberapa besar tingkat ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset perusahaan. Dari pengertian tersebut, ROA merupakan alat untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan mengelola total aset setelah disesuaikan dengan biaya untuk mendapatkan aset tersebut. Selain itu juga bisa untuk menilai efektifitas perusahaan

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan semua aktiva yang dimilikinya (Mudrajat Kuncoro Suhardjono, 2002).

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis dan kualitas kinerja, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan para *stakeholders* lainnya agar perusahaan perbankan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan efisiensi. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “apakah penerapan *Corporate Governance*, yang dalam penelitian ini mencakup indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?”. Berdasarkan uraian dan bukti empiris yang telah dilakukan oleh peneliti - peneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk menguji “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah”.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *Corporate Governance*. Teori agen ini dikembangkan oleh Michael Johnson, yang

memandang bahwa manajemen perusahaan (*agents*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Teori agen dipandang lebih luas karena teori ini dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *Corporate Governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999).

Good Corporate Governance

Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut *GCG*, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (*GCG*) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu: (Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPBs, 2010).

Jurnal STIE Swasta Mandiri

1. **Transparansi** (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas** (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban** (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. **Profesional** (*professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. **Kewajaran** (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja Keuangan Syariah

Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran dari prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank (Jumingan, 2011).

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Di Indonesia Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris.

Dewan Direksi

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian direksi dalam RUPS

haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.

Komite Audit

Effendi (2007) Keberadaan komite Audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), adapun yang membentuk Komite Audit adalah Komite Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengelolaan perusahaan. Keberadaan Komite Audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan sangat diperlukan terutama dari aspek pengendalian, maka Komite Audit perlu mendapatkan perhatian dari manajemen dan Dewan Komisaris serta pihak-pihak terkait yang bertindak sebagai regulator seperti Menteri keuangan, Menteri BUMN, Bapepam dan Bursa Efek Indonesia

Dewan Pengawas Syariah

DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha, serta ahli dan praktisi ekonomi). DSN MUI mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah - masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah DSN adalah singkatan dari dewan syariah nasional. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip - prinsip

hukum islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk menjadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah (Soemitra, 2009). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009).

Penelitian Terdahulu

Eko (2015) meneliti pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perbankan syariah (studi kasus pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di indonesia periode 2010-2013). Menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Tetapi, Variabel dewan direksi, dewan komisaris independent dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Cahyani (2009) meneliti pengaruh corporate governance perception index terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta. Menunjukkan hasil pengujian untuk model regresi dengan *return on equity* sebagai variabel dependennya menunjukkan variabel CGPI secara positif signifikan mempengaruhi kinerja operasi.

Nur dan M.Yayang (2015) meneliti pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Menunjukkan terdapat pengaruh

yang positif antara good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah tidak ditolak praktik good corporate governance yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya good corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

Paulus (2013) meneliti struktur kepemilikan mekanisme tata kelola perusahaan dan biaya keagenan di Indonesia (studi empirik pada perusahaan di bursa efek Indonesia). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan mayoritas keluarga dalam perusahaan berpengaruh menekan biaya keagenan.

Perumusan Hipotesis

Menurut Sugiyono, (2013) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, hipotesis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

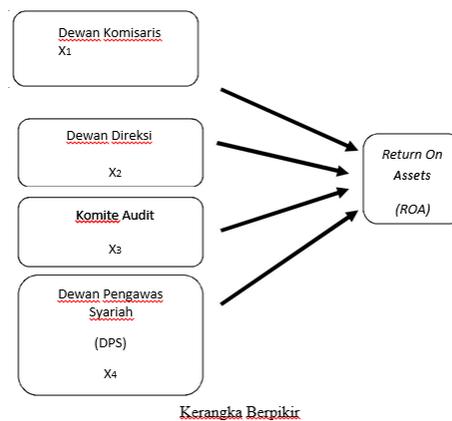
H1 = Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap ROA

H2 = Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap ROA

H3 = Ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap ROA

H4 = Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap ROA

Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data dokumentasi, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan data sekunder yang bersifat time series. variabel independennya adalah corporate governance sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia pada tahun 2012-2016. Pengambilan data periode tahun 2012-2016 dikarenakan peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dikeluarkan pada tahun 2009. Pengambilan

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, salah satu teknik pengambilan sampel non probabilistic yang dilakukan berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria berikut:

1. Bank Umum Syariah yang telah berdiri sendiri (bukan unit usaha syariah).
2. Bank tersebut menerapkan sistem *Good Corporate Governance* dan mempublikasikan laporan GCG dalam *Annual Report*-nya.
3. Bank yang memiliki asset tertinggi mulai dari 200 Milyar sampai dengan 1 Trilyun berdasarkan laporan keuangan di tahun 2016. Selain dilihat dari kriteria jumlah asset yang dimiliki BUS tersebut, penilaian BUS yang dipilih juga dinilai berdasarkan banyaknya jumlah kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK).

Berdasarkan kriteria tersebut, hanya ada 7 BUS yang memiliki jumlah kantor cabang terbanyak yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah Indonesia yang secara konsisten melaporkan laporan keuangan pada tahun

2012 sampai dengan 2016. Dari 13 lembaga keuangan yang termaksud dalam Bank Umum Syariah, terdapat 7 lembaga keuangan yang mempunyai asset terbesar dan nasabah terbanyak di Indonesia. Berdasarkan metode *purposive sampling*, maka jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 perusahaan sampel. Periode pengamatan untuk pengujian hipotesis adalah tahun 2012-2016, sehingga *pooled data* untuk 5 periode sebesar 35 sampel (7x5).

Deskripsi Perusahaan Yang dijadikan Objek Penelitian

Tabel Deskripsi Perusahaan Yang dijadikan Objek Penelitian

No	Nama Perusahaan	Jumlah
1	Bank Muamalat Indonesia	5
2	BRI Syariah	5
3	BNI Syariah	5
4	BCA Syariah	5
5	Bank Mega Syariah	5
6	Bank Panin Syariah	5
7	Bank Syariah Mandiri	5
	Total	35

Sumber : data sekunder yang diolah, 2017

Hasil Uji Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 5 variabel yaitu ukuran dewan komisaris (X1), ukuran dewan direksi (X2), ukuran komite audit (X3), ukuran dewan pengawas syariah (X4), dan ROA (Y). sebelum diuraikan hasil analisis data, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi Statistik dari setiap variabel. Deskriptif statistik bertujuan memberikan gambaran data variabel-variabel penelitian mengenai nilai maksimum, minimum, rata-

rata dan standar deviasi untuk 35 data pengamatan

Tabel Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
ROA		3	11.683	.88951	35
D_KOMIS	2	6	3.94	1.187	35
D_DIRE	3	8	4.29	1.274	35
KOMITE_AUDIT	2	7	3.77	1.114	35
DPS	2	3	2.43	.502	35

Sumber : data sekunder yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel diketahui bahwa skor ukuran dewan komisaris berkisar antara 2 sampai dengan 6, dengan mean sebesar 3,9429 dan deviasi standar (std. deviation) 1,18676. Ukuran dewan direksi berkisar antara 3 sampai dengan 8, dengan mean sebesar 4,2857 dan deviasi standar (std. deviation) 1,274. Ukuran komite audit berkisar antara 2 sampai dengan 7, dengan mean sebesar 3,7714 dan deviasi standar (std. deviation) 1,114. Ukuran dewan pengawas syariah berkisar antara 2 sampai dengan 3, dengan mean sebesar 2,4286 dan deviasi standar (std. deviation) 0,502, dan Return On Asset (Y) berkisar antara 0 sampai dengan 3, dengan mean sebesar 1,1683 dan deviasi standar (std. deviation) 0,88951.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai SD (std. deviation) variabel ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah dan Return On Asset lebih kecil dari pada nilai rata-rata (mean), yang mengindikasikan hasil yang baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi mencerminkan penyimpangan dari data

variabel tersebut yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi (Uji F)

Uji F bertujuan menguji signifikansi pengaruh secara simultan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah terhadap Return On Asset. Hasil uji F dengan program SPSS 17 disajikan seperti tabel berikut :

Tabel Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.418	4	.604	.741	.572 ^b
1 Residual	24.484	30	.816		
Total	26.902	34			

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,741 dengan tingkat signifikansi 0,572 > 0,05. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah terhadap Return On Asset.

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variasi dependen. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan alat analisis regresi berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.448	.967		1.496	.145
D_KOMIS	-.208	.178	-.277	-1.164	.254
1 D_DIRE	-.062	.172	-.089	-.362	.720
KOMITE AUDIT	.010	.174	.013	.059	.953

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat variabel independen yang signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk variabel ukuran dewan komisaris sebesar (0,254), variabel ukuran dewan direksi sebesar (0,720), variabel ukuran komite audit sebesar (0,953), dan untuk variabel ukuran dewan pengawas syariah sebesar (0,395).

3. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai Adjusted R2 dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya kinerja keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Berdasarkan pada table menunjukkan bahwa koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R2 sebesar 0,031 (3,1%). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah mampu mempengaruhi kinerja keuangan sebesar 3,1% Sisanya 96,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.300 ^a	.090	.031	.90340

Sumber : data sekunder yang diolah, 2017

4. Ukuran Dewan Komisaris

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada

Bank Umum Syariah. Artinya jumlah dewan komisaris yang lebih banyak akan lebih efektif dalam pengawasan pada Bank Umum Syariah.

Ditunjukkan melalui hasil Uji t, dimana X1 sebagai variabel independent (ukuran dewan komisaris) memiliki nilai t hitung > t tabel atau p value < 0,05. Yaitu diperoleh nilai t hitung sebesar -1,164 dengan nilai probabilitas 0,254 yang lebih besar dari 0,05, maka H₀ diterima artinya ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hisamuddin dan Tirta (2012) serta Tertius dan Christiawan (2015) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap ROA.

5. Ukuran Dewan Direksi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Ditunjukkan melalui hasil Uji t, dimana X2 sebagai variabel independent (ukuran dewan direksi) memiliki nilai t hitung > t tabel atau p value < 0,05. Yaitu diperoleh nilai t hitung sebesar -0,362 dengan nilai probabilitas 0,720 yang lebih besar dari 0,05, maka H₀ diterima artinya ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Kartika (2014) yang

menghasilkan bahwa variabel ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan variabel ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

6. Ukuran Komite Audit

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Ditunjukkan melalui hasil Uji t, dimana X3 sebagai variabel independent (ukuran komite audit) memiliki nilai t hitung $> t$ tabel atau p value $< 0,05$. Yaitu diperoleh nilai t hitung sebesar 0,059 dengan nilai probabilitas 0,953 yang lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima artinya ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marihot Nasution dan Dody Setiawan (2007) yang menghasilkan bahwa variabel ukuran komite audit mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan variabel ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

7. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah.

Ditunjukkan melalui hasil Uji t, dimana X4 sebagai variabel independent (ukuran dewan pengawas syariah) memiliki nilai t hitung $> t$ tabel atau p value $< 0,05$. Yaitu diperoleh nilai t hitung sebesar 0,864 dengan nilai probabilitas 0,395 yang lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima artinya ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irmala Sari (2010) yang menghasilkan bahwa variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah terhadap Return On Asset, dimana nilai F hitung sebesar 0,741 dengan nilai probabilitas sebesar $0,572 > 0,05$. Artinya ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah secara bersama-sama

tidak bernilai signifikan serta tidak berpengaruh terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah.

2. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel ukuran dewan komisaris (X1) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,254 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan H_a yang menyatakan “secara parsial ada pengaruh signifikan antara jumlah dewan komisaris terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah”, ditolak. Berarti tidak ada pengaruh yang nyata antara jumlah dewan komisaris (X1) terhadap kinerja keuangan perbankan (Y)

3. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel ukuran dewan direksi (X2) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,720 lebih besar dari 0,05. hal ini menunjukkan H_a yang menyatakan bahwa “secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara jumlah dewan direksi terhadap kinerja keuangan perbankan” ditolak. Berarti tidak ada pengaruh yang nyata antara jumlah dewan direksi (X2) terhadap kinerja keuangan (Y)

4. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel ukuran komite audit (X3) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,953 Lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan H_a yang menyatakan bahwa “secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah” ditolak. Berarti tidak ada pengaruh yang nyata antara

komite audit (X3) terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah (Y).

5. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t) terhadap variabel ukuran dewan pengawas syariah (X4) diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,395 lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan H_a yang menyatakan bahwa “secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah” ditolak. Berarti tidak ada pengaruh yang nyata antara ukuran dewan pengawas syariah (X4) terhadap kinerja keuangan (Y).

6. Berdasarkan pengujian analisis regresi berganda membuktikan bahwa komite audit dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *Return On Asset*, sedangkan dewan komisaris dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset*

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian menunjukkan Adjusted R Square yang rendah, yaitu sebesar 3,1%. Hal ini berarti masih ada faktor lain yang lebih besar dalam mempengaruhi kinerja keuangan selain ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan ukuran dewan pengawas syariah.

2. Variabel komite audit dalam mengukur keefektifannya hanya diukur dengan menggunakan jumlah anggota tanpa memasukkan karakteristik lain seperti

kompetensi anggota, pendidikan dan faktor lainnya yang lebih dapat menunjukkan keefektifan komite audit.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis serta keterbatasan penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Menambah periode penelitian menjadi lebih panjang agar efek dari mekanisme *Good Corporate Governance* dapat lebih dirasakan dalam mempengaruhi kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah.

2. Menambah jumlah sampel perusahaan perbankan dengan tidak hanya melibatkan undang-undang atau peraturan yang mengikat perusahaan publik saja tapi lebih menitik beratkan pada peraturan yang mengikat perusahaan sendiri, misalnya peraturan Bank Indonesia Nomer 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah, sehingga perusahaan yang menjadi sampel penelitian menjadi lebih banyak dan lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Arthesa & Edia Handiman. 2006. *Bank dan lembaga keuangan bukan bank*. Jakarta: PT.INDEKS kelompok Gramedia.
- Amir Machmud dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah, Teori, kebijakan, Dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta :Erlangga.
- Andi Supangat. 2010. *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media, Jakarta.
- Bambang Riyanto, 2013, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi 4. BPFE, Yogyakarta.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 2008.
- Chtourou, L., S. Marrachi., J. Bedard, 2001. *Corporate Governance and Earning Managemen*.
- Eisenhardt, Kathleem. (1989). *Agency Theory: An Assesment and Review*. Academy of Management Review, 14. Hal 57-74.
- Effendi. M. Arief. 2005. *Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 1 No. 1 Hlm. 51 – 57, ISSN

:0216-8642.<http://muhariefeffendi.wordpress.com/2007/11/08/peranankomite-audit-dalam-meningkatkan-kinerja-perusahaan>. [diakses 28 Juli 2017]

Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar* : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* . Journal of Financial Economics, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.

Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

KNKCG (2004) *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.

Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.

Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE , Yogyakarta.

Kusumawati, Dwi Novi dan Bambang Riyanto. (2005). *Corporate Governance dan Kinerja : Analisis Pengaruh Compliance reporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja*. Simposium Nasional Akuntansi VIII.

Mawardi, Wisnu. 2005. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Dengan Total Assets Kurang dari 1 Triliun)*, Jurnal Bisnis Strategi, Vol. 14, No. 1, hal. 83-94.

Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. 2007. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia*. SNA X Makasar.

Oemar, Fahmi. 2014. *Pengaruh Corporate Governance dan Keputusan Pendanaan Perusahaan Terhadap Kinerja Profitabilitas dan Implikasinya Terhadap Harga Saham*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11, No. 2 September 2014: 369-402.

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.

Jurnal STIE Swasta Mandiri

Peraturan Bank Indonesia NOMOR 11/ 33/PBI/2009 Tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.*

Peraturan pemerintah No.64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1998 tentang *Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.*

Prasetyo dan Indradie, <http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-keluarkan-aturan-tata-kelolabank-syariah-1>. [28 Juli 2017]

Sari, Irmala. (2010). "*Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional*". Universitas Diponegoro. Thesis.

Sayidah, Nur. 2007. *Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik (Studi Kasus Peringkat 10 Besar CGPI Tahun 2003, 2004, 2005)*. JAAI, Vol. 11, No. 1. Hal: 1-19.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS Perihal *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* tanggal 30April 2010, Hlm. 2.

Surya, Indra, dan Yustiavandana, Ivan, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance*, Penerbit Prenada Media Grup, Jakarta.

Wibisono, Haris. 2004. *Pengaruh Earning Manajemen terhadap Kinerja di Seputar SEO*.

Wolfensohn, James. D. 1999. *Good Corporate Governance, Pengertian dan Konsep Dasar*. World Bank

Zarkasyi, Moh Wahyudi, 2008. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Alfabeta, Jakarta.